

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki tugas utama membantu Pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah. Lembaga ini terdiri dari anggot yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai, dalam pemilihan umum legislatif. Pemilihan anggota dilakukan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat provinsi.

Sejalan dengan perkembangan situasi dan politik nasional yang telah berubah secara drastis, yaitu dengan berkembangnya demokrasi. Diiringi munculnya parpol- parpol dengan jumlah puluhan parpol, maka penataan perwakilan suara rakyat berupa kelembagaan DPRD juga mengalami perubahan, baik kualitas maupun kuantitas. Dalam skala lingkup regional, hal ini tercermin melalui tampilan gedung DPRD yang ada di Indonesia.

Kabupaten Halmahera Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Labuha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.779,32 km<sup>2</sup>. Kabupaten Halmahera Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara atau saat ini menjadi Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Undang-undang No. tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara.

Di Kabupaten Halmahera Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terbentuk pada tahun 2004 sampai Sekarang. Pada saat ini Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Selatan berada di jalan Kebun Karet, Kapung Makian. Kec, Bacan Selatan.

Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas legislasi dan persetujuan terhadap aturan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah. tugas DPRD tersebut membuatnya memiliki hak legislatif

membentuk peraturan daerah bersama dengan eksekutif, memberikan persetujuan rancangan anggaran dan peraturan, memberikan pendapat, hingga pengawasan kekuasaan dan kebijakan eksekutif dalam ruang lingkup daerah. Sistem yang terbuka dan transparan pada pemerintah adalah salah satu kunci terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. tetapi hal tersebut harus juga diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai, agar sistem berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bukan hanya menjadi sistem belaka, tetapi bisa mencukupi kebutuhan dan kenyamanan untuk menunjang suatu sistem yang sedang berjalan khususnya dipemerintahan. Selain sarana dan prasarana, fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pemerintahan daerah. Gedung DPRD tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan legislatif, tetapi juga sebagai simbol representasi demokrasi di tingkat daerah. Di Kabupaten Halmahera Selatan, kebutuhan akan gedung DPRD yang baru semakin mendesak seiring dengan perkembangan wilayah dan dinamika sosial-politik yang terjadi.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas legislatif dan pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan, dibutuhkan gedung DPRD yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut secara optimal. Perkembangan teknologi dan konsep arsitektur modern berkelanjutan menawarkan peluang untuk merancang gedung DPRD yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga ramah lingkungan dan hemat energi. Konsep ini sangat relevan dalam konteks global saat ini yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Selain aspek teknis dan fungsional, nilai-nilai budaya lokal juga memegang peranan penting dalam perancangan gedung DPRD baru. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kekayaan budaya yang dapat diintegrasikan dalam desain bangunan, seperti motif-motif tradisional, penggunaan bahan lokal, dan tata ruang yang mencerminkan kearifan lokal.

Integrasi ini tidak hanya akan memperkuat identitas budaya daerah, tetapi juga menciptakan gedung DPRD yang unik dan memiliki nilai estetika tinggi.

Oleh karena itu, perancangan gedung DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan pendekatan arsitektur modern berkelanjutan dan integrasi nilai budaya lokal menjadi topik yang sangat relevan untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep desain yang inovatif, fungsional, dan berkelanjutan, serta mencerminkan identitas budaya lokal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Halmahera Selatan.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang diungkapkan adalah Bagaimana mendesain Gedung DPRD di kabupaten Halmahera- Selatan dengan pendekatan arsitektur Neo Vernakular yang dapat mengangkat ciri khas dari bangunan- bangunan bersejarah di Kesultanan Bacan.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Perancangan.**

### **1.3.1 Tujuan Perancangan.**

Di bangunnya Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah:

#### **1. Fasilitasi Fungsi Pemerintahan**

Membangun gedung yang mampu mendukung kegiatan dan fungsi pemerintahan, khususnya bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran.

#### **2. Peningkatan Pelayanan Publik.**

Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah dan nyaman.

#### **3. Pencerminkan Identitas Lokal.**

Menggunakan pendekatan arsitektur Neo Vernakular untuk mencerminkan budaya dan identitas lokal dalam desain bangunan, sehingga gedung tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika dan budaya.

### **1.3.2 Manfaat Perancangan.**

Berdasarkan tujuan di atas maka muncul manfaat perancangan sebagai berikut:

1. Manfaat Fungsional.

Gedung DPRD yang dirancang dengan baik akan mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal, sehingga meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

2. Manfaat Sosial.

Dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik yang baik, masyarakat akan merasakan manfaat langsung berupa kemudahan akses terhadap layanan pemerintahan. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

3. Manfaat Budaya.

Penerapan arsitektur Neo Vernakular akan melestarikan dan mempromosikan budaya lokal melalui elemen-elemen desain tradisional yang diintegrasikan dengan teknologi modern.

### **1.4 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembahasan dalam hal ini difokuskan pada perancangan Gedung DPRD di Kabupaten Halmahera selatan dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Merupakan tahap pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat perancangan, ruang lingkup perancangan, dan sistematika penulisan serta kerangka pikir yang di rankai secara sistimatis.

#### **BAB II TUJUAN TEORI**

Menguraikan tentang objek rancangan dan tujuan umum atau kajian teori yang berkaitan dengan objek rancangan, serta studi literatur atau tinjauan objek sejenis yang menjadi perbandingan dan tolak ukur dari objek rancangan.

### BAB III Metode perancangan

Mengurangi tentang tahapan-tahapan dalam proses perancangan yang disusun secara sistematis dan logis, meliputi: tinjauan umum lokasi perancangan, Teknik pengumpulan data, Analisa data dan konsep perancangan.

### BAB IV Tinjauan Objek Rancangan

Mengurai tentang lokasi perancangan, baik tinjauan mengenai penentuan lokasi dan tinjauan mengenai aspek-aspek pendukung dalam perancangan.

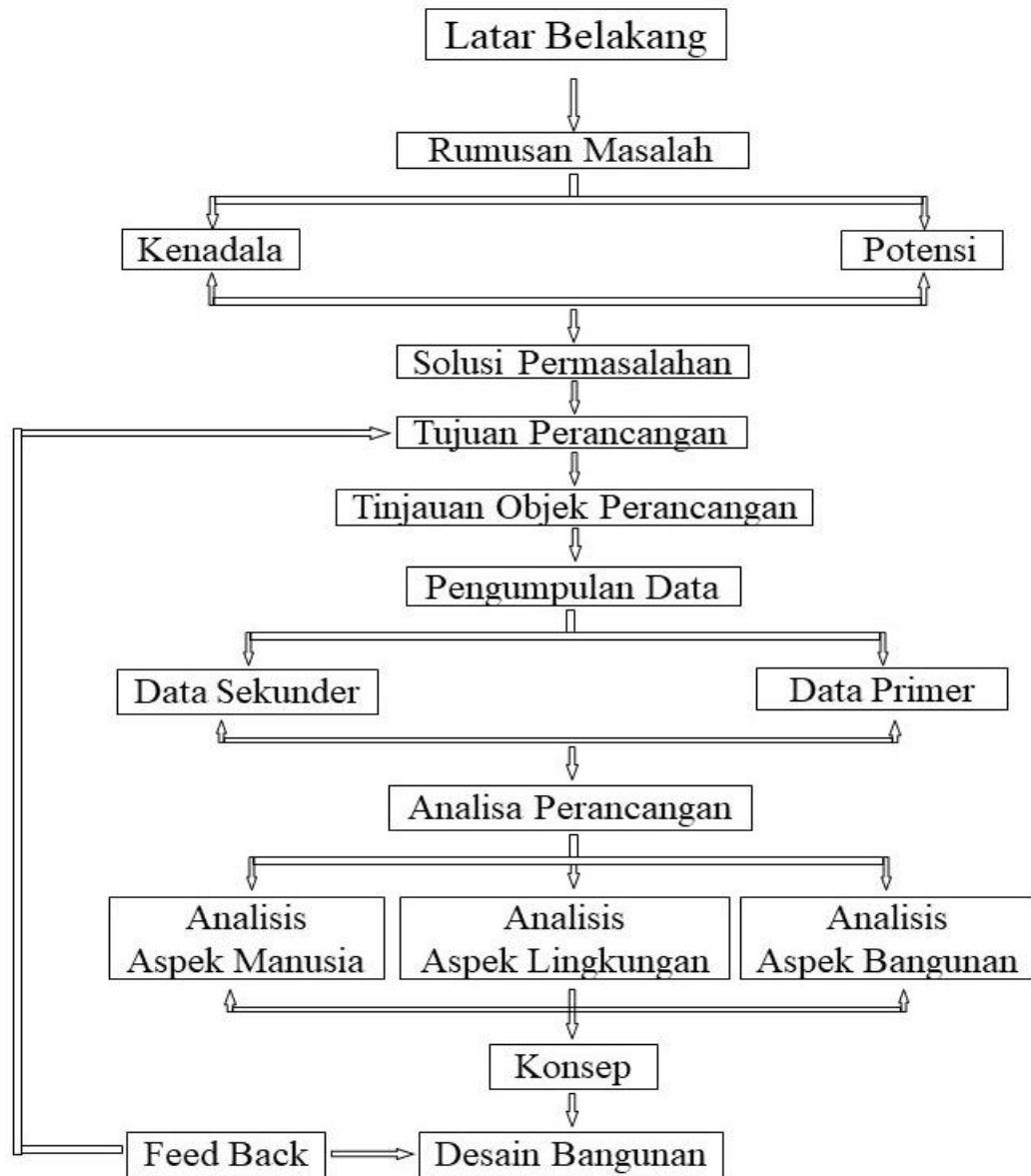
### BAB V Analisa dan Konsep Perancangan.

Mengurai tentang tahapan-tahapan dalam menganalisa berupa aspek manusia, aspek lingkungan, dan aspek bangunan, yang nantinya akan menghasilkan suatu konsep yang sesuai dengan tujuan perancangan.

### BAB VI Penutup

Menguraikan tentang kseimpulan dari keseluruhan hasil penulisan dan saran perancangan Gedung DPRD Kabupaten Halmahera-Selatan

Kerangka Berpikir.



**Gamabar 1.1** Bagan Kerangka Pikir

Sumber: Analisis, 2024